

**Kajian Model Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE) Ketahanan Pangan Keluarga Miskin
di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat**

Hepi Hapsari & Iwan Setiawan ^{*)}

Abstract

The purposed of the study were to investigate knowledge and attitude poor families toward food security program, to identify communication, information and education for food security to recommend communication, information and education model for poor families. The method of study was a descriptive survey with data exploration using quantitative and qualitative. The study showed that knowledge and attitude of poor families toward food security program relatively low and even they do not know the purpose of the program itself. The proposed Communication, Information and Education models was group and mass approach using various media and sources they trust.

Key Words: Communication, Information and Education, food security, poor families

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program-program ketahanan pangan; mengidentifikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk program ketahanan pangan; merumuskan rekomendasi model KIE ketahanan pangan keluarga miskin. Metode penelitian adalah survey deskriptif dengan eksplorasi data secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program ketahanan pangan masih relatif rendah. Model KIE yang direkomendasikan adalah pendekatan kelompok dan massa dengan menggunakan berbagai media dan narasumber yang dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Komunikasi, Informasi, Edukasi, ketahanan pangan, keluarga miskin

^{*)} Dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Pendahuluan

Kelompok sosial ekonomi rendah (miskin) seperti umumnya petani dan nelayan dengan segala keterbatasannya merupakan kelompok yang rawan terhadap kekurangan pangan. Suatu fenomena ironi sepanjang sejarah Indonesia, petani dan nelayan yang menghasilkan pangan namun mereka pula yang sering menderita kekurangan pangan. Namun, dengan berbagai upaya mereka tetap berusaha untuk dapat mencapai tingkat ketahanan pangan. Menurut Hidayat Syarief (1992), upaya-upaya keluarga dalam mengatasi keadaan kerawanan (ketidaktahanan pangan) dapat dikatakan sebagai upaya adaptasi (*coping mechanism*). Dampak dari menurunnya ketahanan pangan keluarga adalah munculnya masalah kurang gizi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya generasi yang hilang (*lost generation*). Keadaan ini cenderung menguat seiring meningkatnya jumlah penduduk miskin sebagai dampak krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan pangan dan gizi melalui program pengentasan kemiskinan seperti Raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), secara empiris terbukti kurang efektif dan pada banyak kasus menemui kegagalan. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh implementasi program yang tidak mempertimbangkan pendekatan keberlanjutan (*sustainable livelihoods approach*) (Farrington *et al.* 1999). Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program penanggulangan kerawanan pangan dan kelaparan selama ini adalah : 1)

seringkali mengabaikan kemandirian dan peningkatan kapasitas diri dari penerima bantuan, 2) tidak disesuaikan dengan aspirasi dan kondisi masyarakat, dan 3) tidak diintegrasikan dengan modal sosial atau energi sosial lokal (sumberdaya manusia, kelembagaan dan jaringan sosial).

Konsep ketahanan pangan yang umum digunakan didasarkan pada dua pendekatan. *Pertama*, berdasarkan ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi semua penduduk untuk hidup secara aktif dan sehat. *Kedua*, didasarkan atas akses individu atau rumah tangga terhadap pangan. Artinya, semakin tinggi akses rumah tangga terhadap pangan, semakin tinggi ketahanan pangannya (Bank Dunia, 1988 dalam Rachman dan Suhartini, 1996). Ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan produksi, pengadaan atau distribusi pangan sehingga bahan pangan dapat tersedia dengan cukup dan berkesinambungan, kuantitas maupun kualitasnya di tingkat rumah tangga dan dapat terdistribusi secara proporsional antara anggota keluarga (Soetatwo Hadiwigeno, 1996). Meskipun pasokan pangan melimpah, banyak orang kekurangan pangan sebagai akibat keterbatasan sumberdaya untuk memproduksi atau membeli pangan yang dibutuhkan (Soekirman, 1996). Permasalahan muncul ketika jumlah penduduk miskin semakin banyak, sedangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan pangan murah bersifat terbatas. Oleh karena itu, selain bantuan pangan yang sifatnya jangka pendek, warga miskin pun harus diberdayakan, baik melalui

penguatan informasi maupun komunikasi, informasi dan edukasi, sehingga tercipta kemandirian pangan secara jangka panjang,

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan pangan dimaksudkan untuk perubahan sosial yang sistemik yang mendukung ketahanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. KIE adalah upaya perubahan sosial yang diorganisasikan dengan baik oleh sekelompok orang (*change agent*) dalam jangka pendek maupun panjang dengan tujuan untuk mengubah, mengganti, atau memperkenalkan ide-ide, gagasan, kepercayaan, atau perilaku kepada sekelompok orang (*target adopter*). Selain upaya-upaya yang bersifat *coersive* (perubahan melalui pemaksaan), perubahan sosial dilakukan melalui lima strategi yakni : 1) teknologi, 2) ekonomi, 3) politik-hukum, 4) pendidikan, dan 5) *social marketing* (Kotler & Roberto, 1989).

Strategi pendidikan atau edukasi dapat berbentuk pendidikan formal dengan memasukkan materi ketahanan pangan dalam kurikulum sekolah umum; pendidikan non formal melalui pelatihan singkat; dan pendidikan informal melalui pola asuh orangtua. Strategi *social marketing* sering diasosiasikan dengan Komunikasi dan Informasi adalah penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik marketing sebagai upaya meningkatkan daya terima dari ide-ide, nilai-nilai, atau perilaku yang diharapkan diserap dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran yang ditarget (Kotler, 1985).

Kodyat (1992) menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai masalah pangan, gizi dan kesehatan di Indonesia pada masa yang akan

datang, harus diterapkan strategi intervensi yang menyeluruh (*comprehensive strategy*) yaitu perpaduan yang dinamis dan serasi antara dua strategi utama yakni strategi intervensi langsung dan strategi intervensi tidak langsung (KIE). Strategi intervensi langsung yang masih dipertahankan di masa datang meliputi : 1) pemberian makanan tambahan kepada anak balita di Posyandu dan kepada anak Sekolah Dasar, khususnya di daerah kantong kemiskinan; 2) bantuan pangan untuk daerah rawan pangan; 3) fortifikasi zat gizi pada bahan makanan strategis (garam, *instant food*, dll); dan 4) pemberian tablet Fe, Vit A, Yodium di daerah endemik

Intervensi tidak langsung (KIE) akan mendapat perhatian lebih besar di masa datang. Intervensi KIE bertujuan menciptakan masyarakat sadar pangan dan gizi. Intervensi KIE yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah (DepKes, DepTan, MenkoKesra) terfokus pada *provider* (petugas penyuluh). Saat ini dan di masa yang akan datang akan lebih terfokus pada masyarakat. Lebih jauh Kodyat (1992) menyatakan bahwa KIE yang akan datang memiliki karakteristik: 1) berorientasi masyarakat pengguna; 2) spesifik dan jelas sasaran maupun pesannya, artinya ada segmentasi khalayak yang tentu akan berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi; 3) menggunakan multimedia; 4) disampaikan oleh *provider* terlatih dan atau *public figure*; 5) menarik dan mengundang partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif; dan 6) memotivasi konsumen (masya-

rakat) untuk melakukan perubahan perilaku dengan bangga atau mengadopsi produk yang ditawarkan. Karakteristik intervensi KIE tersebut tidak lain adalah karakteristik pemasaran sosial (*social marketing*). Pemasaran sosial gizi dan kesehatan yang pernah dilakukan DepKes adalah "KIE Gizi Melalui Hiburan" (*nutrition education through entertainment*).

Menerapkan KIE yang akan datang tentu tidak cukup dengan hanya mengandalkan rancangan di atas meja dan masukan-masukan dari orang luar, tetapi membutuhkan dasar yang objektif yang bersumber dari keluarga miskin sebagai subjek pemberdayaan. Melalui pendekatan ini, memungkinkan diperoleh rumusan model KIE ketahanan pangan yang representatif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program-program ketahanan pangan; dan (2) merumuskan model Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan pangan keluarga miskin.

Metode Penelitian

Penelitian dirancang secara kualitatif dengan teknik survey deskriptif dan analisis deskriptif. Sebanyak 30 keluarga miskin peserta program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dipilih secara purposif dari setiap desa terpilih di Kabupaten Bandung. Dua Desa yang dipilih berasal dari kecamatan rawan pangan (Desa Cipedes, Kec. Paseh dengan KK miskin sebanyak 85,29 % dan Desa Mekarwangi, Kec. Ibum dengan KK miskin sebanyak 92,17 %) serta dua desa yang lainnya berasal dari

kecamatan tahan pangan (Desa Tarajusari, Kec. Banjaran terdapat budaya Lumbung Desa Gotong Royong Simpan Pinjam dan Desa Bojongmangu, Kec. Pameungpeuk telah dibudidayakan shorgum sebagai upaya diversifikasi tanaman pangan). Pemilihan keluarga miskin secara purposif berdasarkan keterlibatan rumah tangga (5-8 rumahtangga per jenis program) pada program-program ketahanan pangan dan kemiskinan, meliputi: 1) Program desa mandiri pangan (Mapan); 2) Program diversifikasi pangan; 3) Program lumbung desa; 4) Penguatan modal usaha ekonomi pedesaan; 5) Beras miskin (Raskin); 6) Bantuan Langsung Tunai (BLT); 7) Asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Askeskin); 8) Pemberian Makanan Tambahan (PMT), 9) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan 10) Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Keluarga Miskin terhadap Program Ketahanan Pangan

Secara kuantitatif, telah banyak program ketahanan pangan yang digulirkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, baik yang terintegrasi maupun yang berdiri sendiri. Namun faktanya, separuh (50%) masyarakat miskin belum mengetahui program tersebut. Masyarakat miskin justru lebih akrab dengan program pengentasan kemiskinan daripada program ketahanan pangan, seperti program Raskin (92,5%), BLT (69,2%) dan BOS (45,0%). Program lainnya yang relatif akrab dengan mereka adalah

Bantuan Sembako (33,3%), baik dari pemerintah, swasta maupun swadaya. Ironisnya, meskipun sebagian besar rumah tangga miskin di pedesaan berstatus sebagai petani, namun hanya 34,8% dari mereka yang mengetahui program yang berkaitan dengan usahatani.

Secara kuantitatif, persentase rumah tangga miskin di Kec. Paseh dan Ibun yang tidak mengetahui program ketahanan pangan lebih tinggi (masing-masing 65,8% dan 70,0%) dibandingkan dengan di Kec. Banjaran dan Pameungpeuk (masing-masing 6,1% dan 8,1%). Artinya, intensitas sosialisasi dan implementasi program ketahanan pangan kepada rumah tangga miskin di pedesaan harus lebih ditingkatkan. Ini sangat penting, karena secara riil modal sosial masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan ketahanan pangan juga semakin melemah dari sistem sosialnya.

Sikap Keluarga Miskin terhadap Program Ketahanan Pangan

Hasil penelitian mengungkap, meskipun hanya sebagian kecil rumah tangga miskin yang mengetahui dan tersentuh program ketahanan pangan, namun mereka tetap bersikap positif (berharap) terhadap program-program ketahanan pangan (35,3%). Hal ini terjadi karena, bagi masyarakat miskin yang siang maupun malam senantiasa dihantui kecemasan memikirkan kecukupan pangan hari per hari, kehadiran program ketahanan pangan jelas “bagai orang tenggelam mendapat pegangan”. Bahkan, sebagian besar (63,4%) dari mereka

sangat positif sikapnya terhadap program Raskin.

Bagi keluarga miskin yang tidak terlalu paham terhadap konsep ketergantungan, kehadiran program ketahanan pangan tidak terlalu dikhawatirkan (70,8%). Paradoks dengan itu, kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sudah ketergantungan terhadap program-program ketahanan pangan yang cepat saji (instan), sebut saja Raskin dan BLT. Kecenderungannya, respon sebagian besar dari mereka terhadap program-program ketahanan pangan jangka panjang, seperti program lumbung pangan, kurang positif. Ironisnya, tidak sedikit keluarga miskin di Banjaran yang menyatakan tidak setuju dengan program lumbung pangan. Padahal, Banjaran merupakan salah satu lokasi percontohan pengembangan lumbung masyarakat desa.

Secara umum, program ketahanan pangan jangka pendek dipandang sangat positif oleh rumah tangga miskin di desa-desa yang lembaga ketahanan pangan lokalnya (seperti lumbung desa) sudah tidak berfungsi dan tidak eksis lagi (40,9%), termasuk di Paseh. Bahkan, sekitar 83,3 persen rumah tangga miskin di Kec. Ibun dan 96,7 persen di Kec. Pameungpeuk menyatakan perlunya perpanjangan program ketahanan pangan. Sebagian rumah tangga miskin (38,3%) memandang bahwa program ketahanan pangan (khususnya untuk rumah tangga miskin) juga masih kurang, baik jumlah, jenis, intensitas maupun kontinuitasnya. Hal tersebut mendapat penegasan dari sekitar 40,9% rumah tangga miskin yang selama ini lemah aksesnya terhadap program sembako murah.

Berbeda halnya dengan keluarga miakin di Kec.Ibun, Paseh dan Pameungpeuk, sebagian besar (93,3%) rumah tangga miskin di Kec. Banjaran justru bersikap pesimis dan perlu meninjau ulang program ketahanan pangan. Mereka memandang bahwa berbagai program ketahanan pangan yang digulirkan selama ini dapat dan telah mengakibatkan terjadinya ketergantungan, melemahkan eksistensi kelembagaan lokal dan modal-modal sosial ketahanan pangan. Kepedulian, gotong-royong dan kerjasama saling membantu dan menolong mulai melemah dari tengah masyarakat, seiring dengan semakin menguatnya ketergantungan (*ngandelkeun*) pada program-program dari luar masyarakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya paradok sikap antara pesimisme semu rumah tangga miskin pinggiran kota (Banjaran) dengan optimisme semu rumah tangga miskin pedesaan (Paseh, Ibun dan Pameungpeuk). Keluarga miskin di Banjaran merasakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kelembagaan lokal, khususnya lumbung pangan, semakin melemah. Keluarga miskin di desa-desa kasus lainnya justru merasa lebih nyaman dan berdaya dengan program ketahanan pangan, karena modal sosial ketahanan pangan masyarakatnya telah lama melemah dan sebagian lenyap. Dikatakan paradoks, karena sejatinya, semua keluarga miskin, pada saat-saat tertentu, akan tetap membutuhkan perlindungan dan bantuan, termasuk program ketahanan pangan. Apalagi, risiko dan ketidakpastian rumah tangga miskin dalam pengadaan dan penyediaan pangannya semakin hari semakin tinggi.

Tingkat Partisipasi dalam Kelompok dan Kegiatan Sosial

Salah satu kekhawatiran banyak pihak terhadap program-program (proyek) bantuan adalah melemahnya modal sosial masyarakat, termasuk tingkat partisipasinya dalam berbagai aktivitas dan kelembagaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi keluarga miskin di Kab. Bandung dalam kelompok dan kegiatan sosial berada pada kondisi yang lemah. Hal ini terjadi karena program masih bias elit, sehingga partisipasi rumah tangga miskin hanya tampak pada kegiatan pengajian, aktivitas posyandu dan gotong-royong fasilitas fisik publik, seperti perbaikan fasilitas umum, jaringan irigasi dan jaringan jalan.

Partisipasi yang sangat rendah terlihat pada kegiatan kelompok tani, koperasi, kelompok peternak, kelompok kesenian daerah dan penyuluhan. Ironis, padahal lembaga-lembaga tersebut identik dengan program-program ketahanan pangan. Peran Karang Taruna dalam ketahanan pangan juga lemah. Selain akses para pemuda terhadap sumberdaya lahan dan pertanian lemah, juga kelembagaannya kurang mendapat perhatian dan diberdayakan, khususnya bagi penguatan ketahanan pangan keluarga miskin. Padahal, salah satu kelompok Karang Taruna di Kecamatan Ibun termasuk yang berprestasi dan mendapat penghargaan di Kab. Bandung.

Kelompok kesenian daerah yang dulu begitu merakyat dan ampuh dijadikan sebagai media dan pendekatan penyuluhan pertanian di zaman Bimas dan Inmas, kini tidak mendapat banyak apresiasi dari

masyarakat, termasuk dari keluarga miskin. Padahal, untuk pengembangan KIE, kelompok kesenian daerah merupakan media yang dapat dioptimalkan bagi penguatan ketahanan pangan keluarga miskin. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan terjadi bukan karena kurang diminati, tetapi juga kurang mendekat ke kaum miskin dan mutu layanan informasinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat miskin. Secara spasial, tingkat partisipasi rumah tangga miskin dalam kelompok dan kegiatan sosial lebih tampak di Kec.Banjaran dan Pameungpeuk daripada di Kec. Paseh dan Ibut. Padahal, Paseh dan Ibut lebih bercorak tradisional dibandingkan dengan Banjaran dan Pameungpeuk.

Kontak dengan Sumber dan Narasumber Informasi

Seperti halnya penguasaan atau pemilihan media komunikasi, kontak rumah tangga miskin dengan sumber informasi atau narasumber terkait dengan ketahanan pangan juga menampilkan kinerja yang lemah. Hasil penelitian mengungkap bahwa intensitas kontak rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung menampilkan kinerja yang rendah (53,3% responden menyatakan tidak pernah kontak dengan sumber dan nara sumber informasi yang ditanyakan). Intensitas kontak yang tinggi hanya terjadi dengan aparat desa, bidan desa dan kader posyandu, tokoh agama dan media televisi.

Intensitas kontak dan komunikasi keluarga miskin dengan penyuluh yang selama ini menjadi

motor dalam program ketahanan pangan sangat minim, bahkan 74,2% responden tidak pernah kontak dengan penyuluh. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi unit desa, toko sarana produksi, pihak perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai pemimpin lokal dalam pembangunan pertanian, tokoh tani juga tidak banyak dijadikan sebagai sumber informasi oleh keluarga miskin. Kalaupun terjadi komunikasi, sifatnya hanya hubungan kerja (menjadi buruh tani) atau buruh panen, sehingga tidak ada transfer informasi.

Tingkat/Mutu Pelayanan Media/Sumber Informasi

Secara umum, kinerja (kualitas layanan) sumber informasi di Kab. Bandung berada pada kondisi yang lemah. Hal ini sangat terkait dengan lemahnya keterkaitan sistem informasi pertanian (*linking system*) antara dinas teknis, lembaga penelitian, perguruan tinggi, media massa, dan kelompok tani. Mutu layanan informasi yang paling lemah justru ditampilkan oleh penyuluh, ketua kelompok tani atau tokoh tani dan penjual sarana produksi pertanian. Ironis, meskipun jumlah media dan sumber informasi semakin banyak dan beragam, namun sangat sedikit (bahkan ada yang tidak sama sekali) menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh rumah tangga miskin. Akibatnya, baik secara fisik, maupun secara kualitas, akses rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung menampilkan kinerja yang rendah.

Hal ini menegaskan bahwa transformasi masyarakat pedesaan dari tradisional (komunal) ke modern

(media dan institusi) belum berjalan efektif. Indikatornya, ketika peran dan kedudukan sumber-sumber dan media-media lokal komunal menipis, media publik tidak serta merta merepresentasinya, sehingga, meskipun akses keluarga miskin terhadap radio, VCD, televisi dan *handphone* (HP) sudah cukup tinggi, namun faktanya belum menjadi dan memberikan layanan informasi produktif yang menyentuh kepentingan dan aktivitas keluarga miskin.

Model KIE Ketahanan Pangan

Berdasarkan input-input sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa model KIE ketahanan pangan yang prospektif untuk jangka panjang hendaknya dikembangkan dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development/empowerment*). Pendekatan partisipatif atau belajar sosial (*social learning process*) hendaknya diterapkan dalam setiap tahapan KIE (pemberdayaan) keluarga miskin, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan. Peran pemberdaya (terutama fasilitator) harus cerdas menangkap masukan-masukan dari masyarakat (terutama dari keluarga miskin), sehingga alternatif solusi terapresiasi, terakomodasi dan terinternalisasi.

Substansi alternatif solusi (program ketahanan pangan jangka panjang) harus dipahami benar dan menyeluruh oleh keluarga miskin. Konsekuensinya, proses apresiasi harus dilakukan secara maksimal, menggunakan beragam pendekatan dan media komunikasi atau edukasi yang sesuai dengan keadaan

keluarga miskin, melibatkan partisipan dan pemimpin lokal yang terseleksi kepeduliannya, kecerdasan nuraninya dan pemihakannya terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga miskin. Rumusan modelnya dapat disimak pada Gambar 1.

Penerapan Model KIE Ketahanan Pangan, terutama untuk keluarga miskin, jelas membutuhkan komitmen para pelaku dan konsistensi dalam proses. Hal ini perlu mendapat penekanan karena besarnya kontaminan yang dapat membiaskan segalanya, termasuk tujuannya. Apalagi dengan kondisi dan sikap keluarga miskin yang sudah kurang positif dalam memandang program ketahanan pangan jangka panjang, sebut saja program lumbung pangan. Terlebih perilaku sebagian besar elit-elit desa yang sudah bias proyek, miskin nurani dan lekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap konsep dan program ketahanan pangan masih rendah. Mereka juga kurang motivasi untuk mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri, dan cenderung mengharap bantuan langsung dari pemerintah atau lingkungan sosialnya.
2. Belum ada strategi KIE Ketahanan Pangan, khususnya untuk keluarga miskin yang menjadi sasaran program.
3. Model KIE Ketahanan Pangan yang direkomendasikan adalah :

- a. Isi pesan sesuai dengan tema yang paling diminati, antara lain : raskin, lumbung desa simpan pinjam, dan diversifikasi pangan
- b. Media menggunakan alat bantu yang paling diminati masyarakat, antara lain televisi, poster dan brosur
- c. Narasumber yang paling dipercaya dan disukai keluarga miskin adalah aparat desa, bidan desa, pengurus Posyandu, dan tokoh agama.

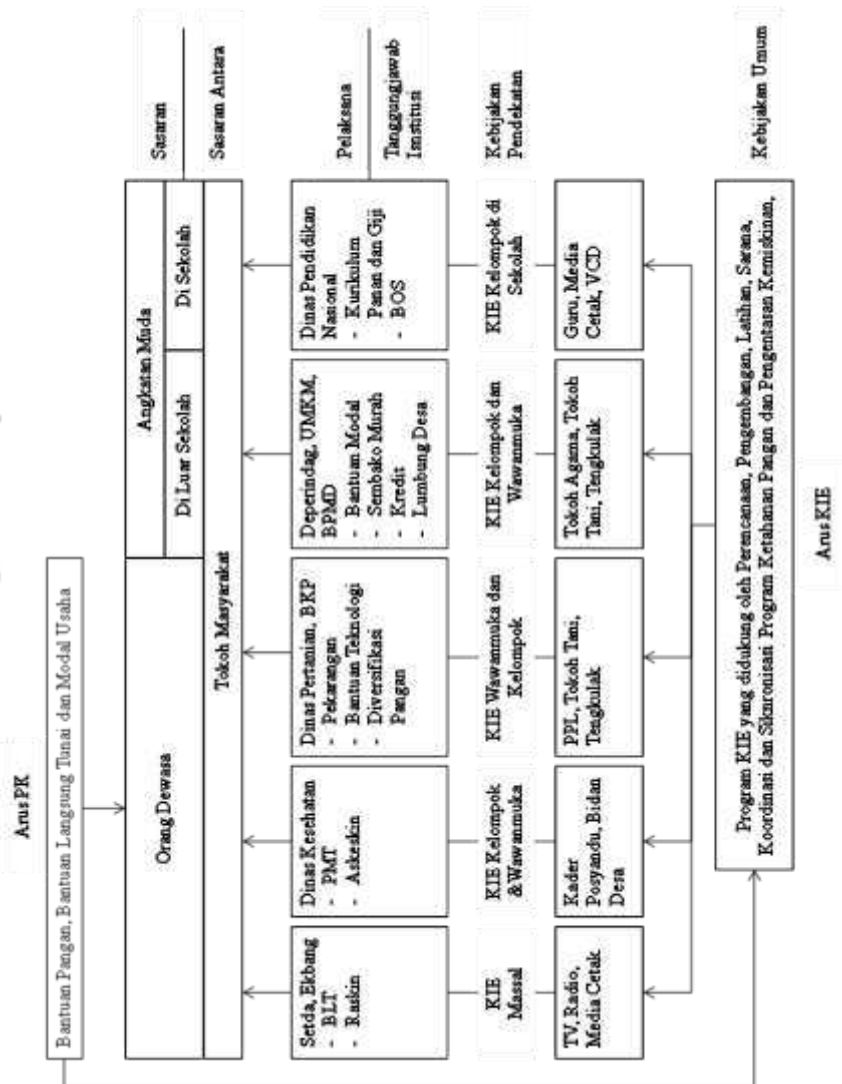
Saran

1. Meningkatkan peran narasumber yang diminati masyarakat dan

meningkatkan kompetensi narasumber yang kurang diminati masyarakat agar dapat berperan lebih baik dalam KIE ketahanan pangan.

2. Rekayasa sosial untuk membentuk budaya tahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Keluarga miskin harus dididik untuk tidak sekedar menyukai Raskin, BLT dan BOS yang sifatnya jangka pendek, namun lebih jauh harus dapat mencari beras, uang dan biaya sekolah sendiri melalui program-program penguatan usaha ekonomi masyarakat.

Gambar 1
Model Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Ketahanan Pangan Keluarga Miskin



Daftar Pustaka

- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) Tahun 2006-2008*. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2000. *Program Pembangunan Pertanian*. Jakarta.
- Farrington, J., and N.C. Saxena. 1999. *Protecting and promoting livelihoods in rural India: what role for pensions?*. London: ODI.
- Hidayat Syarif. 1992. *Survei Keragaman Pangan dan Gizi Masyarakat. Metoda Statistika untuk Pangan dan Gizi Masyarakat*. IPB. Bogor.
- Kodyat, Benny A. 1992. Kebijakan Program Gizi Menyongsong Era Lepas Landas dan Abad 21 dalam Prosiding Pelatihan KIE Petugas Gizi Tingkat Provinsi. Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Kotler, Philip. 1985. *Marketing For Non Profit Organization*. Prentice Hall, New Delhi.
- Kotler, Philip and Eduardo L. Roberto. 1989. *Sosial Marketing : Strategy for Changing Public Behavior*. The Free Press, New York.
- Rachman, H.P.S. dan M. Ariani. 2002. *Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- dan S.H. Suhartini. 1996. *Ketahanan Pangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Tengah dan NTB*. Jurnal Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Soekirman. 1996. *Ketahanan Pangan : Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya*. Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Deptan-UNICEF. Yogyakarta.
- Soetatwo Hadiwigono. 1996. *Program dan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. Lokakarya Ketahanan Pangan Rumahtangga, DEPTAN-UNICEF. Yogyakarta.